

BAB I

Pendahuluan

A. Alasan Pemilihan Judul

Industri tekstil merupakan industri nomor tiga terbesar dalam perdagangan dunia setelah industri pariwisata dan industri informatika. Industri tekstil cenderung menjanjikan dimasa yang akan datang bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Setelah pemerintah Indonesia menggalakkan ekspor non migas maka industri tekstil merupakan salah satu alternatif yang menjanjikan dalam mengartikulasi fenomena ini. Realitasnya industri tekstil seperti halnya ekspor benang, tenun, serat kain zat pewarna, serta pakaian jadi atau garment telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman, di mana era perdagangan bebas lebih mengisyaratkan kemunculan liberalisasi khususnya di bidang ekonomi oleh para aktor negara, sehingga menuntut pemerintah dalam hal ini Departemen Perindustrian yang mempunyai otoritas untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan industri dalam hal ini khususnya tekstil agar dapat menghadapi pasar bebas dan mampu berkompetisi di era perdagangan bebas dimasa yang akan datang.

Kegiatan pasar bebas, tepatnya setelah diberlakukannya putaran Uruguay 1994 yaitu disahkannya GATT (General Agreement on Tariff and Trade) yang kemudian diubah menjadi WTO (World Trade Organization) pada tahun 1995 ini,

dalam konteks Perdagangan Internasional sekalipun. Kesepakatan ini dibuat bersama-sama maka mau tidak mau setiap negara berkewajiban untuk mematuhi aturan main guna menjamin perdagangan bebas dunia yang mengutamakan kompetisi demi efisiensi global.

Mengingat hal tersebut maka dapat dijadikan sebuah tantangan baru bagi industri tekstil untuk dapat lebih memanfaatkan peluang ini yang mengakibatkan persaingan dalam kualitas produk dan harga, sehingga membuat industri tekstil Indonesia ini bisa bersaing pada pasaran global. Untuk itulah peran pemerintah Indonesia dalam hal ini khususnya Departemen Perindustrian dalam hal ini sebagai otoritas yang juga berwenang atas kelangsungan semua industri khususnya industri tekstil mempunyai kebijakan startegis guna meningkatkan daya saing industri tekstil nasional dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas 2010 mendatang. Melihat gambaran tersebut penulis tertarik untuk meneliti fenomena ini dengan judul “Upaya Departemen Perindustrian Dalam meningkatkan Daya Saing Industri Tekstil Menghadapi Perdagangan Bebas 2010.”

B. Latar Belakang Masalah

Abad ke-21 ditandai dengan liberalisasi disegala bidang yang ditandai dengan Structural Adjustment Program oleh lembaga-lembaga finansial global, dan disepakati oleh rezim GATT bahkan WTO. Liberalisasi terjadi ketika diterapkannya formasi sosial baru dengan berlakunya mekanisme globalisasi perdagangan dunia yang baru. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa tidak saja ditandai dengan kemampuan meningkatkan produksi per orang akan tetapi juga

ditandai dengan sebagian besar perubahan struktur ekonomi maupun pranata sosial secara masif. Industrialisasi ditempuh oleh sebagian besar negara berkembang termasuk Indonesia karena industrialisasi cenderung menguntungkan dibanding sektor ekonomi yang lain. Untuk negara – negara ASEAN termasuk Indonesia telah melakukan kerjasama AFTA bahkan dengan negara Asia Pasifik menjalin kerjasama APEC, semuanya merupakan langkah menuju kearah globalisasi ekonomi.

Berbagai usaha bilateral untuk meliberalkan praktek perdagangan, manajemen perdagangan internasional mengharuskan pengutamaan “fair trade” bukan “free trade” di mana semua bentuk hambatan-hambatan dalam perdagangan bebas hendaknya dapat dihapuskan sehingga persaingan yang bebas dan saling menguntungkan dapat tercapai. Perdagangan internasional tekstil yang mengetumakan fair trade diharapkan dapat tercapai pada tahun 2010 mendatang yaitu dengan terhapusnya berbagai hambatan dagang tekstil baik yang bersifat restriksionisme maupun proteksionisme dengan menjunjung tinggi daya saing baik keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif negara produsen tekstil, sehingga arus perdagangan tekstil dunia bisa lebih optimal dari setiap negara produsen tekstil termasuk juga Indonesia.

Sejalan dengan dihapuskannya MFA (Multi Fiber Arrangement), maka persaingan global khususnya industri tekstil menjadi semakin ketat. Secara garis besar siapa yang tidak memiliki keunggulan kompetitif maka cepat atau lambat akan kalah dan tergeser dari percaturan persaingan global. Selama ini regim quota jumlah tekstil ekspor ke negara-negara Amerika dan Eropa terbatas pada jumlah

kuota yang diberikan, Indonesia sebagai salah satu negara produsen tekstil yang cukup besar merasakan pengaruh dari hambatan non tarif tersebut terhadap ekspor nasional, semisal tren ekspor tekstil Indonesia tahun 2003 dan 2004 mengalami penurunan yang signifikan. Bila masalah yang menyebabkan penurunan ekspor tekstil ini tidak segera ditangani, maka sulit bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara lain, semisal negara Cina dan Vietnam yang menunjukkan kinerja ekspor yang semakin meningkat dewasa ini.

Industri tekstil nasional merupakan salah satu industri padat karya unggulan, salah satu industri strategis setelah ekspor migas bagi sektor perekonomian nasional Indonesia. Industri tekstil merupakan industri penghasil devisa terbanyak dari ekspor non migas serta penyedia lapangan pekerjaan. Penurunan ekspor tekstil nasional akhir-akhir ini disebabkan oleh adanya dua faktor masalah yaitu masalah internal dan masalah eksternal.

Masalah eksternal dengan munculnya pesaing-pesaing baru industri tekstil yang memiliki keunggulan komparatif dalam harga antara lain China, Pakistan, Korea Utara, Bangladesh, Vietnam, dsb. Di samping itu muncul Negara industri lapis kedua (NIC's) seperti Taiwan, Singapura, Hongkong, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dsb. Dan juga tantangan restriksionis dan proteksionis dari negara – negara maju¹. Restriksi impor dan hambatan non tarif yang diberlakukan pemerintah untuk mengatasi penyelundupan justru meningkatkan disparitas harga impor dan harga tekstil domestik. Penyelundupan tekstil menimbulkan distorsi dan dikhawatirkan dapat merusak pasar tekstil Indonesia di luar negeri.

¹ Faisal Daud, *Perdagangan Internasional*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 100.

Masalah internal khususnya menyangkut kondisi keamanan, produksi, distribusi serta kurangnya pemanfaatan SDM yang berkualitas, sistem pengelolaan manajemen kuota, peraturan – peraturan pemerintah, kenaikan BBM, pajak, dsb². Masalah keamanan yang belum pulih membuat banyak pengusaha tekstil melakukan relokasi ke negara lain. Tingginya ketergantungan industri tekstil Indonesia pada bahan impor memperbesar biaya produksi. Jalur perdagangan yang dianggap kurang lancar karena banyaknya hambatan-hambatan. Kebijakan verifikasi di pelabuhan menjadi pemicu lambatnya proses pengapalan dan menambah beban biaya khususnya biaya ekspor. Belum lagi pajak PPn terhadap kapas impor sebesar 10% membebani cash/flow industri tekstil. Suku bunga yang masih dianggap tinggi oleh beberapa pelaku bisnis tekstil dan juga otonomi daerah menambah beban bagi industri dengan tambahan berbagai macam pungutan/retribusi. Restrukturisasi mesin terhambat dengan tidak tersedianya dukungan finansial.

Masalah - masalah seperti ini hendaknya lebih bisa teratasi demi masa depan industri tekstil Indonesia³. Realitas perkembangan global haruslah direspon positif oleh pelaku industri tekstil nasional dan pemerintah (Departemen Perindustrian) namun tentunya tanpa mengesampingkan isu lingkungan hidup, masalah buruh, maupun hak asasi manusia, serta isu strategis yang lain. Masalah yang dihadapi industri tekstil ini banyak dikeluhkan oleh para pengusaha namun pemerintah belum cukup serius untuk menanganinya. Bila hal ini dibiarkan, maka bisa dipastikan industri tekstil nasional akan benar-benar hancur. Untuk itu

² *Indonesian Textile Magazine*, No.8/ thn.XI/2005,hal19-20.

³ *Indonesian Textile Magazine*, No.8/ thn.XI/2005,hal19-20.

industri tekstil Indonesia masih haruslah berbenah guna keluar dari beberapa persoalan tersebut dan bisa dibilang hanya sedikit yang siap dalam menyambut liberalisasi tekstil. Permasalahan tekstil yang memerlukan penanganan sesegera mungkin dan serius dalam masalah-masalah yang muncul pada realitas industri tekstil nasional agar industri tekstil nasional dapat bertahan dan bersaing dalam menghadapi liberalisasi perdagangan bebas 2010 mendatang⁴.

C. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah “Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia (Departemen Perindustrian) dalam meningkatkan daya saing industri tekstil dalam menghadapi perdagangan bebas 2010?”

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia (Departemen Perindustrian) guna meningkatkan daya saing komoditi tekstil di era perdagangan bebas, membuktikan hipotesa dengan teori yang relevan, serta untuk memperkaya khasanah keilmuan dibidang ekonomi politik internasional khususnya yang berkenaan dengan perdagangan bebas 2010 mendatang.

E. Kerangka Berfikir

Dalam upaya menganalisa fenomena liberalisasi industri tekstil ini, penulis menggunakan kerangka berfikir konseptual, yaitu: Konsep Perdagangan Bebas, Konsep Daya Saing (competitiveness), Konsep Keunggulan Komparatif

⁴ Ibnu Yusuf, *Perdagangan Bebas dan Daya Saing Industri*, Jakarta: PT Gramedia, 1998, hal. 110

(Comparative Advantage), Konsep Keunggulan Kompetitif (Competitive Advantage), Konsep Kebijakan Perdagangan Strategis (Strategic Trade Policy), dan Konsep Kepentingan Nasional. Konsep Perdagangan Bebas berawal dari para ekonom liberal yang menganggap bahwa kemakmuran bersama antara dua negara atau lebih akan semakin besar bila perdagangan bebas berlangsung antara mereka, hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa masing-masing negara memiliki tingkat efisiensi berbeda yang berkenaan pada tingkat produksi serta pemilikan sumber daya ekonomi.

Konsep Perdagangan Bebas mengilhami munculnya konsep daya saing (competitiveness) yang terdiri dari konsep keunggulan komparatif (comparative advantage) dan konsep keunggulan kompetitif (competitive advantage), selanjutnya pemerintah memberlakukan konsep kebijakan perdagangan strategis (Strategic Trade Policy). Kebijakan strategis pemerintah tersebut diciptakan untuk mendukung keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tekstil nasional dalam perdagangan dengan berbagai cara seperti pemberian subsidi pada kegiatan penelitian dan pengembangan suatu produk hingga mencapai tingkat efisiensi produksi yang lebih baik dari negara lain dikancah globalisasi perdagangan tekstil dunia. Kebijakan Perdagangan strategis semata ditujukan untuk mencapai Konsep Kepentingan Nasional suatu negara, dalam hal ini kepentingan nasional pemerintah Indonesia adalah liberalisasi industri tekstil untuk menghadapi perdagangan bebas 2010. Maka untuk menghadapinya dengan memfokuskan dan menguatkan basis keunggulan relatif ekonomi kita dalam globalisasi perdagangan

1. Konsep Perdagangan Bebas

Merupakan suatu konsep ekonomi dimana lalu lintas transaksi perdagangan antar bangsa dilakukan secara bebas tanpa hambatan, bahwa lalu lintas barang antar negara tidak lagi dibatasi dan dibebani (bebas dari tariff, bea masuk, sistem kuota maupun prosedur pabean) yang rumit dan berbelit – belit⁵. Konsep perdagangan bebas ini berawal dari pemikiran ekonom liberal yang dipelopori oleh David Ricardo dan Adam Smith, yang menyatakan bahwa kemakmuran bersama dua negara atau lebih akan semakin besar apabila perdagangan bebas berlangsung diantara mereka. Dan cara paling efektif untuk meningkatkan kekayaan nasional menurut David Ricardo dan Adam Smith adalah dengan membiarkan pertukaran antar individu dalam ekonomi domestik dan internasional secara bebas tanpa ada batasan atau dengan kata lain adanya prinsip-prinsip Liberalisme Ekonomi⁶.

2. Konsep Daya saing (Competitiveness).

Merupakan konsep ekonomi yang memaparkan mengenai upaya suatu negara terhadap suatu produk agar mampu diunggulkan dikancah perdagangan internasional sejajar dengan produk yang sama dari negara lain⁷. Negara-negara cenderung melakukan ekspor bagi produk-produk yang bisa mereka produksi dengan cara yang lebih baik atau dengan harga yang lebih murah dibanding negara lain, serta beralih untuk mengimpor produk yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri secara lebih efektif. Konsep ini dapat dibedakan menjadi dua sub

⁵ Amir Ms, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, Kreasi Jaya Utama, Jakarta, 1993, hal.220.

⁶ Dawam Rahardjo, *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, vol.8, FE UII, Yogyakarta, 1996, hal36.

⁷ Dick W Griffin & Donald J Ebert, *Prinsip-prinsip Ekonomi* jilid 1, diterjemahkan oleh Edisa C

konsep yaitu konsep keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan konsep keunggulan bersaing (*competitif advantage*).

Konsep ini mampu menjelaskan realitas industri tekstil nasional saat ini yang kian menurun eksportasinya dibanding negara-negara lain sesama pengeksport tekstil. Disisi lain realitas permintaan akan tekstil dunia selalu meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dunia setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan daya saing industri tekstil nasional dibanding negara-negara lain khususnya dalam hal ekspor tekstil nasional. Untuk itulah perlu ada diferensiasi yang jelas mengenai pemahaman antara konsep keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan konsep keunggulan bersaing (*competitif advantage*) terhadap realitas industri tekstil nasional agar nantinya mampu meningkatkan daya saingnya dalam menghadapi perdagangan bebas dunia 2010.

2.1 Konsep Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*).

Merupakan konsep yang memaparkan mengenai keunggulan suatu negara untuk memproduksi beberapa produk lebih murah atau lebih baik dari negara lain. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif akan suatu produk yaitu apa bila dapat memproduksi secara lebih efisien dan lebih baik dari negara-negara lainnya. Realitas industri tekstil nasional yang merupakan salah satu industri unggulan Indonesia akhir-akhir ini mengalami penurunan ekspor. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan permintaan terhadap tekstil nasional dibanding negara-negara lain penghasil tekstil, karena permintaan akan tekstil dunia pasti meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dunia. Menurut data menunjukkan ekspor China mengalami peningkatan 23,79%, Vietnam 1,89%, India

13,64%, Pakistan 3,07%. Sedangkan ekspor China melesat 8 kali lipat dari Indonesia yang mencapai US\$ 60 miliar pada tahun 2007. Vietnam dari tiga tahun lalu US\$300 juta sekarang sudah US\$ 2 miliar hanya ke AS⁸. Melihat realitas yang ada seharusnya industri tekstil nasional menjadi industri unggulan komparatif Indonesia, maka perlu adanya pemahaman dan penerapan konsep keunggulan kompetitif terhadap industri tekstil nasional ini.

2.2. Konsep Keunggulan Bersaing (Competitive Advantage).

Merupakan konsep yang memaparkan mengenai keunggulan bersaing internasional yang berakar dari kombinasi kondisi faktor, kondisi permintaan, industri terkait dan industri pendukung, serta strategi struktur dan persaingan yang diterapkan oleh suatu negara. Kondisi faktor yang dimaksud berkaitan dengan faktor-faktor produksi yang senantiasa muncul pada setiap keberlangsungan industri tidak terkecuali industri tekstil nasional terdiri dari tenaga kerja, permodalan, sumberdaya alam, permesinan, dll. Melihat realitas industri tekstil nasional yang merupakan industri padat karya tentunya banyak sekali menyerap tenaga kerja yang disisi lain merupakan jaminan pengaman sosial.

Dari segi permodalan sendiri telah ada program bantuan restrukturisasi permesinan industri tekstil dari pemerintah sebesar Rp255 miliar yang tiap tahunnya yang telah tersalurkan sebesar Rp. 153,31 Milyar kepada 92 perusahaan industri tekstil pada tahun 2007. Program bantuan ini menstimulus terjadinya investasi mesin / peralatan yang dilakukan oleh dunia usaha industri tekstil sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai bantuan Pemerintah atau ekuivalen dengan

⁸ *Elman tekstil china meningkat* <http://www.kompas.com/> 2008 kali

Rp. 1,55 Triliun yang pembiayaan sebesar 50,34% bersumber dari sektor Perbankan⁹. Pihak perbankan sendiri sudah mulai menganggap industri tekstil dari high risk industry menjadi low risk industry sehingga mampu membantu investasi disektor industri tekstil nasional.

Kondisi permintaan mencerminkan besarnya basis konsumen yang meningkatkan permintaan yang kuat akan produk-produk yang inovatif. Pada industri tekstil, permintaan dunia akan produk tekstil dunia selalu meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dunia setiap tahunnya biarpun dikatakan adanya penurunan daya beli konsumen. Untuk itulah perlu adanya artikulasi permintaan konsumen untuk lebih mengerti produk seperti apa yang diinginkan oleh konsumen agar tekstil nasional bisa meningkatkan daya saingnya di dunia internasional.

Industri terkiat dan industri pendukung yang tercermin dalam pembentukan industri klaster tekstil nasional. Pembentukan klaster industri tekstil ini diharapkan dapat tercapai efisiensi dan efektifitas industri tekstil nasional. Strategi, Struktur dan persaingan berkaitan dengan upaya menekan ekonomi biaya tinggi, peningkatan kualitas produksi, produktifitas yang semakin tinggi, dan inovasi produk-produk baru. Oleh karena itu, Departemen Perindustrian diharapkan harus dapat mempertimbangkan dan merumuskan langkah strategis dalam mensiasati perkembangan-perkembangan dan sekaligus juga menghadapi

⁹ *PRESS RELEASE PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN (PENINGKATAN TEKNOLOGI) INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL* Direktorat Jenderal Industri

tantangan yang harus diantisipasi bersama terutama berkaitan dengan kualitas produksi maupun persaingan harga.

3. Konsep Kebijakan Perdagangan Strategis (Strategic Trade Policy).

*“International state can pursue policies that give advantage of scale or similar and benefit to its national firm, the state has powerful incentive to intervention in become a major in international competitiveness comparative advantage is larger arbitrary and external ties or spillover for one industry to another exist: the knowledge generated in one sector can benefit other factor and raise the overall the technological level and economy. These states should support and protect those industrial sector that produce rents and are considered to have strategic value for international competitiveness”.*¹⁰

Negara dapat menentukan kebijakan yang memberikan keuntungan berskala atau serupa dan manfaatnya untuk kepentingan perusahaan. Negara memiliki kekuatan yang intensif untuk melakukan campur tangan dalam persaingan internasional. Keuntungan komparatif adalah pengaruh yang besar dan mengikat orang keluar atau berdampak luas dari suatu industri terhadap eksistensi yang lain, kebangkitan ilmu pengetahuan dalam satu sektor dapat menguntungkan faktor – faktor lain dan menimbulkan peningkatan teknologi dan ekonomi.

Praktek perdagangan strategis sering kali dikaitkan dengan kebijakan industrial pemerintah, yaitu kebijakan intervensi ekonomi demi mempromosikan suatu pola pembangunan industri yang diinginkan. Dalam Keppres Nomor 40 tahun 1999 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis, dapat dikatakan bahwa dalam upaya membangun infrastruktur industri nasional dalam rangka peningkatan ketahanan nasional, perlu mengembangkan industri unggulan berbasis teknologi yang bersifat strategis, mengembangkan industri yang bersifat

strategis diperlukan pembinaan yang berorientasi jangka panjang meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri-industri yang bersifat strategis¹¹. Disamping itu pemerintah juga memberikan kemudahan bagi investor untuk masuk ke berbagai bidang industri.

Sejalan dengan itu Departemen Perindustrian melakukan beberapa terobosan yaitu upaya peningkatan daya saing industri nasional dalam rangka menyongsong era globalisasi (SDM dan teknologi). Sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004 dan Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004, maka dibentuklah industri klaster dengan memperkuat industri – industri yang terkait dalam rantai nilai dan juga pemberdayaan serta kemitraan UKM dengan perusahaan. Kesemuanya ini senantiasa diarahkan pada peningkatan utilisasi kapasitas industri , pengembangan UKM, serta ekspor¹². Hal-hal inilah yang merupakan upaya optimalisasi Departemen Perindustrian dalam meningkatkan daya saing industri tekstil nasional.

4. Konsep Kepentingan Nasional (National Interest).

Menurut Hans J Morgenthau, Kepentingan Nasional (National Interest) dalam arti minimum yang inherent merupakan kelangsungan hidup (survival) bagi negara-negara dalam menjaga atau melindungi identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan atau ancaman negara bangsa lain. Kepentingan nasional merupakan kompromi dari kepentingan-kepentingan politik dari berbagai pihak atau kelompok kepentingan yang saling bertentangan yang merupakan hasil persaingan

¹¹ Keppres RI no 40 th 1999 ttg dewan Pembina industri strategis,
<http://www.tempointeraktif.com/...2006,hal2>.

¹² ...

politik yang berlangsung terus menerus dan pemerintah melalui lembaga–lembaga yang bertanggung jawab dalam mendefinisikan dan menerapkan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional tersebut¹³.

Namun dalam hal ini tentunya masih terlalu awam untuk dapat merumuskan dengan pasti apa yang menjadi kepentingan nasional bangsa Indonesia disektor industri tekstil ini. Agar sektor ini dapat meningkatkan daya saingnya di dunia internasional maka harus ada upaya dan komitmen tinggi dari semua pihak untuk tetap menjadikan industri tekstil menjadi primadona dalam menambah devisa negara dari pasar ekspor dunia dimasa depan. Komitmen untuk menyelamatkan sektor ini harus datang dari semua pihak. Tercipta dan terwujudnya kebijakan yang dapat melindungi industri dan perdagangan tekstil agar bisa berdaya saing tinggi di dunia internasional merupakan sebuah jawaban untuk bisa memperjuangkan kepentingan nasional bangsa tersebut dimasa yang akan datang.

Kepentingan nasional Indonesia adalah dengan upaya peningkatan daya saing industri tekstil agar mampu meningkatkan ekspor tekstil nasional dan merebut kembali pasar tekstil dunia yang saat ini didominasi oleh negara-negara low cost economy dan juga negara-negara newly economy countrys sehingga visi ROADMAP Kadin dapat tercapai sebagai barometernya. Menurut ROADMAP 2010 industri nasional yang dikeluarkan oleh Kadin, bahwa perlu ada pertumbuhan ekonomi 7% dimasa depan, peningkatan daya tarik investasi dan daya saing bangsa, serta penurunan kemiskinan dan penciptaan lapangan

¹³ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Teori dan Metodologi*, Pusat Antar

bebas 2010 dan pembatasan periode data dari tahun 2003 s/d 2007 karena dinilai cukup kompeten untuk bisa membantu dalam penelitian ini.

H. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya yang berdasarkan kerangka teori kemudian ditarik hipotesa yang selanjutnya akan dibuktikan melalui data empiris. Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi pustaka dan juga wawancara dari berbagai pihak yang terkait dengan industri tekstil, oleh karena itu tergolong dalam data sekunder (secondary data). Data yang dimaksud diperoleh dari berbagai macam studi kepustakaan yang relevan yang berdasarkan literatur, majalah, surat kabar, internet maupun dokumen, ataupun sumber-sumber lain serta wawancara nara sumber yang terkait dengan industri tekstil yang dapat disajikan dalam bentuk deskriptif.

I. Sistematika Penulisan

Bab I : Pada Bab I ini berupa pendahuluan yang berisikan alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kerangka berfikir, hipotesa, jangkauan penelitian dan metode pengumpulan data

Bab II : Pada bab II ini penulis akan menguraikan mengenai pengaruh perdagangan bebas terhadap daya saing industri tekstil di Indonesia. Namun agar lebih mudah dalam menjelaskannya maka penulis membagi menjadi dua Sub BAB yaitu perdagangan bebas sebagai wujud liberalisasi ekonomi dan menurunnya daya saing industri tekstil Indonesia

Bab III : Pada BAB III ini membahas tentang kinerja dan daya saing industri tekstil Indonesia yang ditinjau dari segi hambatan internal dan hambatan eksternal.

Bab IV : Pada BAB IV ini penulis akan menguraikan mengenai upaya Departemen Perindustrian dalam meningkatkan daya saing industri tekstil menghadapi perdagangan bebas 2010 yang terdiri dari dua hal yaitu optimalisasi industri tekstil nasional secara menyeluruh sebagai upaya peningkatan daya saing yang juga terdiri dari beberapa hal yaitu restrukturisasi permesinan industri tekstil, upaya mengurangi ekonomi biaya tinggi serta pembentukan industri klaster, dan peningkatan standar kualitas produksi tekstil dan juga pengembangan kerjasama strategis terkait ekspor industri tekstil baik dari segi internal maupun eksternal.

Bab V : Pada BAB V ini berisi Kesimpulan dari apa yang telah dibahas